

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki kedudukan yang vital dalam perekonomian masyarakat dan bangsa Indonesia. Pencetusnya sebagai soko guru ekonomi memberikan makna tersendiri bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. .

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi (www.depkop.go.id).

Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 Pasal 3 Tahun 1992 tujuan Koperasi adalah Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (*Promote the welfare of members of cooperatives and community*) dan Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (*Participate in building a national economic order*) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu unit usaha koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan usaha koperasi yang paling pokok, sehingga

koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara debitur dengan kreditur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya risiko yang timbul dalam pemberian kredit. Risiko tersebut bisa saja disebabkan karena kredit bermasalah dan penyimpanan/kecurangan karyawan.

Menurut Ismail (2013:125) faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah meliputi lembaga keuangan itu sendiri dimana dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Dapat pula terjadi akibat dari kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif. Selain lembaga keuangan itu sendiri, pihak nasabah juga mempengaruhi kredit bermasalah.

Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya pengendalian internal yang kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui

dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Jika kesalahan dan kecurangan tidak segera ditangani akan sangat merugikan perusahaan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan.

Alasan perusahaan menyusun sistem pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa sistem pengendalian internal pemberian kredit sangat penting bagi koperasi didalam menjalankan aktivitasnya, maka penulis memilih judul **“Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian internal pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya telah berjalan efektif?
2. Apakah pemberian kredit pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya telah berjalan efektif?
3. Apakah pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya telah sesuai dengan sistem pengendalian internal yang ditetapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keefektivitas sistem pengendalian internal pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya
2. Untuk mengetahui keefektivitas pemberian kredit pada Koperasi Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya
3. Untuk mengetahui sesuai tidaknya pelaksanaan pemberian kredit pada sistem pengendalian internal yang sudah ditetapkan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 3 aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

- a. Dapat memberikan informasi secara tertulis cara mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkreditan di suatu koperasi.
- b. Dapat menjadi sebagai bahan perbandingan serta bahan kepustakaan guna menambah pengetahuan dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang akan penelitian pada objek atau masalah yang sama.
- c. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan menganalisis permasalahan dalam efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit secara optimal.

2. Aspek Ilmu Pengetahuan

- a. Dapat memberikan suatu gambaran yang lebih baik bagi Koperasi akan pentingnya peranan sistem pengendalian internal dalam menunjang pemberian kredit yang efektif.

- b. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam masalah perkreditan khususnya dalam pengendalian internalnya.

3. Aspek Praktis

- a. Dapat mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran dalam pemberian kredit sehingga mampu mengurangi resiko kredit macet.
- b. Dapat mengoptimalkan sistem pengendalian internal dalam menunjang pemberian kredit dalam mencapai keefektifitasannya.